



RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

***TAHUN
2026***



SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas perkenan Nya Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu.

Rencana Kerja ini memuat program, kegiatan dan lokasi disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategia (Renstra) 2025 - 2029 Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta hasil evaluasi renja tahun lalu (2024) dan evaluasi renja tahun berjalan (2025).

Rencana Kerja ini disusun dengan memperhatikan asumsi-asumsi dasar yang menggambarkan peran serta potensi sub sektor perkebunan yang diimplementasikan dalam program yang jelas, terukur dan berlanjut serta diplot dalam sub program kegiatan yang berbasis satuan kinerja.

Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi pada penyusunan Renja ini, semoga Allah SWT membalas kerja keras kita semua dalam usaha memajukan sektor perkebunan di Sumatera Selatan.

Demikian, semoga Rencana Kerja ini dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan Pembangunan Perkebunan di Sumatera Selatan Tahun 2026. kritik dan saran masih kami harapkan guna penyempurnaan Rencana Kerja Pembangunan Perkebunan kedepan.

Palembang, 9 Desember 2025

Plt. Kepala Dinas Perkebunan
Provinsi Sumatera Selatan



M. ICHWANSYAH, SP., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19701016 200112 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
I. PENDAHULUAN	1 BAB I
A. Latar Belakang	1 BAB I
B. Landasan Hukum	1 BAB I
C. Maksud dan Tujuan	2 BAB I
D. Sistematika Penulisan	3 BAB I
II. GAMBARAN UMUM DINAS PERKEBUNAN	1 BAB II
III. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA	
ANGGARAN SKPD	1 BAB III
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024.....	1 BAB III
B. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Berjalan (2025)	3 BAB III
C. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	13 BAB III
D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	17 BAB III
E. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	18 BAB III
IV. TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	1 BAB IV
A. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional	1 BAB IV
B. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	1 BAB IV
C. Program dan Kegiatan	2 BAB IV
IV. PENUTUP	1 BAB V

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun Anggaran 2024 ...	2 BAB III
Tabel 3.2. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun Anggaran 2025 ...	3 BAB III
Tabel 3.3 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Tahun 2024	14 BAB III
Tabel 3.4 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Tahun 2025	16 BAB III
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Provinsi Sumatera Selatan	3 BAB IV

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran operasional dari Rencana Strategis (Renstra) untuk satu tahun kedepan dan menjadi pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas.

Renja Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 merupakan langkah strategis untuk menjabarkan Renstra Tahun 2025-2029 menjadi program tahunan yang operasional, mendukung pembangunan perkebunan berkelanjutan ditengah dinamika tantangan seperti perubahan iklim dan rendahnya tingkat produktivitas kebun rakyat.

Dokumen Renja menjadi acuan pertanggungjawaban kinerja Kepala Perangkat Daerah dan memastikan efisiensi anggaran dan pencapaian target indikator untuk mewujudkan perkebunan unggul dan berkelanjutan.

B. Landasan Hukum

Penyusunan rencana kerja perangkat daerah mengikuti berbagai aturan dan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun peraturan daerah. Aturan-aturan tersebut dimaksudkan untuk memastikan perencanaan yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah. Beberapa aturan yang mendasari penyusunan rencana kerja instansi daerah antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan dalam Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Peraturan daerah provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 47 Tahun 2015 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan;
14. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memastikan bahwa Dinas Perkebunan berperan aktif dalam mencapai visi dan misi pemerintah daerah yang telah ditetapkan.
- b. Untuk menyelaraskan dengan kebijakan Nasional dan Daerah dan memastikan bahwa pembangunan daerah mendukung pencapaian tujuan nasional.
- c. Mengawal implementasi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.
- d. Mewujudkan pelaksanaan tujuan dan sasaran, strategis, kebijakan dan program Renstra.

Tujuan penyusunan rencana kerja Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Untuk merencanakan dan melaksanakan berbagai program kegiatan yang dapat mencapai tujuan pembangunan di sub sektor perkebunan.
- b. Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan anggaran serta menghindari pemborosan atau penyalahgunaan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
- c. Untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan benar-benar relevan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
- d. Sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja instansi dalam periode tertentu.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

II. GAMBARAN UMUM DINAS PERKEBUNAN

III. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024
- B. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Berjalan (2025)
- C. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- E. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

IV. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- A. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional
- B. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- C. Program dan Kegiatan

V. PENUTUP

II. GAMBARAN UMUM DINAS PERKEBUNAN

Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Sumatera Selatan, menyatakan bahwa Dinas Perkebunan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan nomor 53 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, pada Dinas Perkebunan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupaten/kota.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan nomor 8 tahun 2018 tentang pembentukan, uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, untuk membantu pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kerjanya Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dibantu 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yaitu:

1. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan (BPSBTP), dan
2. UPTD Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP).

Dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan fungsi dinas adalah memberikan pelayanan antara lain:

Pelayanan di bidang Kesekretariatan

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas perkebunan dalam bidang umum, kepegawaian, keuangan, serta perencanaan. Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran di bidang perkebunan ;
2. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
3. Penataan organisasi dan tatalaksana;

4. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang- undangan;
5. Pengelolaan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah; dan
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pelayanan di bidang Prasarana dan Sarana

Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang prasarana dan sarana meliputi sarana produksi, pembiayaan dan lahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai fungsi :

1. Perencanaan kebijakan di bidang prasarana dan sarana perkebunan;
2. Perencanaan penyediaan dukungan infrastruktur perkebunan;
3. Perencanaan pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi perkebunan;
4. Perencanaan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, alat dan mesin perkebunan;
5. Perencanaan pemberian bimbingan pembiayaan di bidang perkebunan;
6. Perencanaan pemberian fasilitasi investasi di bidang perkebunan;
7. Perencanaan pengendalian kebakaran lahan dan kebun;
8. Pengevaluasian di bidang sarana dan prasarana perkebunan;
9. Pengevaluasian adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
10. Perencanaan dan inventarisasi dan fasilitasi gangguan usaha dan konflik perkebunan;
11. Pengevaluasian pemanfaatan lahan dan tata ruang; dan
12. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pelayanan di bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil mempunyai tugas :

- a) Perencanaan kebijakan dan program pengolahan serta pemasaran hasil perkebunan;
- b) Perencanaan pengembangan kerjasama pemasaran hasil perkebunan;
- c) Perencanaan pengembangan alat/mesin pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan;
- d) Perencanaan kegiatan fasilitasi standarisasi alsintan dan unit pengolahan;
- e) Perencanaan promosi dan pemasaran produk perkebunan;
- f) Perencanaan kegiatan fasilitasi penetapan harga komoditi perkebunan;
- g) Perencanaan kegiatan penyebaran informasi harga komoditi perkebunan;
- h) Perencanaan pembinaan penerapan Standar Nasional Indonesia pengolahan hasil perkebunan;
- i) Pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- j) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pelayanan di bidang Produksi

Bidang Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan di bidang pembinaan produksi perkebunan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Produksi mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan kebijakan peningkatan produksi dan perbenihan tanaman perkebunan;
- b. Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih tanaman perkebunan;
- c. Perencanaan bimbingan penerapan peningkatan produksi tanaman perkebunan;
- d. Perencanaan program pengembangan sentra-sentra produksi perkebunan;
- e. Perencanaan pembinaan, pengawasan program intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi dan peremajaan tanaman perkebunan serta teknis budidaya perkebunan;
- f. Perencanaan pembinaan dan pengawasan perbenihan;
- g. Perencanaan pengkajian dan penerapan teknis budidaya tanaman perkebunan;
- h. Pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pelayanan di bidang Kelembagaan Usaha Perkebunan dan Penyuluhan

Bidang kelembagaan usaha dan penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan di bidang kelembagaan usaha dan penyuluhan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kelembagaan Usaha dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program pembinaan, pendampingan dan pengembangan kelembagaan dan perusahaan perkebunan;
- b. Perencanaan kebijakan dan program di bidang penyuluhan;
- c. Perencanaan program pengembangan sumber daya manusia;
- d. Perencanaan pembinaan kemitraan usaha;
- e. Perencanaan penilaian usaha perkebunan besar dan penilaian fisik kebun;
- f. Pengevaluasian dan monitoring pengelolaan lingkungan hidup dan usaha perkebunan;
- g. Pelaksanaan fasilitasi proses penerbitan Hak Guna Usaha perkebunan;
- h. Pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pelayanan dibidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan

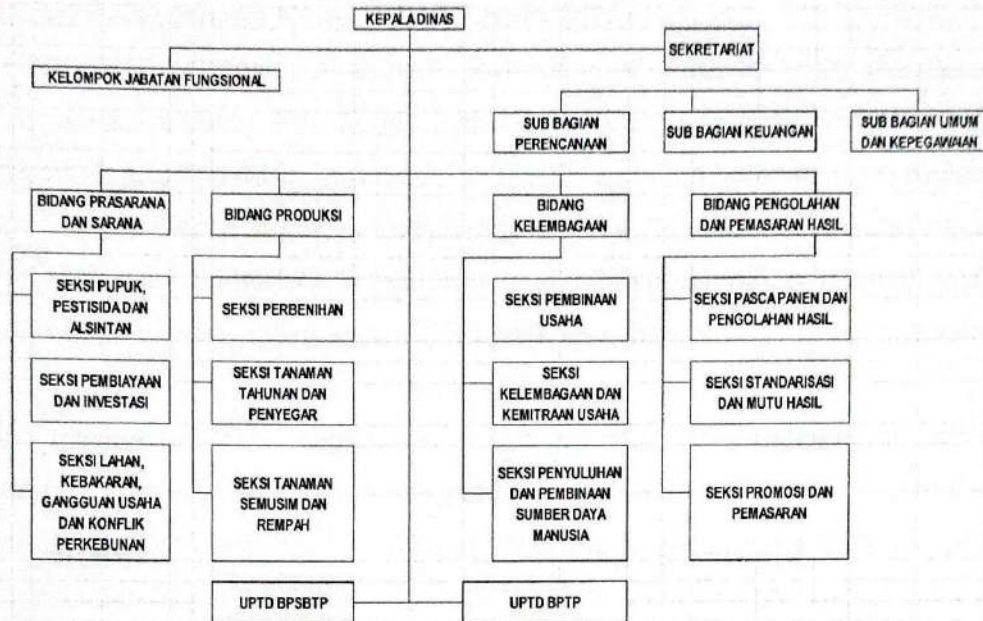
Pelayanan yang dilakukan berupa pemberian bimbingan teknis, pengawasan dan sertifikasi benih dalam rangka penyiapan benih bermutu sesuai dengan standar mutu benih yang ada.

Proses sertifikasi ini dilaksanakan untuk menghindari beredarnya benih-benih yang tidak unggul. Dengan dilaksanakannya proses sertifikasi ini diharapkan benih/bibit yang ditanam merupakan benih/bibit unggul sehingga dapat meningkatkan mutu dan produktivitas tanaman perkebunan.

Pelayanan dibidang Proteksi Tanaman Perkebunan

Pelayanan dalam bidang proteksi perkebunan dengan melaksanakan kegiatan proteksi perlindungan tanaman perkebunan, penyediaan sarana atau bahan pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan, pengamatan dan rekomendasi pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan serta pengembangan teknologi pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Perkebunan



III. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA ANGGARAN SKPD

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024

Tahun 2024, Dinas perkebunan Provinsi Sumatera Selatan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 33.850.315.918,- (Tiga puluh tiga milyar delapan ratus lima puluh juta tiga ratus lima belas ribu sembilan ratus delapan belas rupiah). Anggaran yang terserap adalah sebesar Rp. 19.714.790.977,- (Sembilan belas milyar tujuh ratus empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), atau sebesar 58,24% dari total alokasi anggaran yang tersedia.

Dari semua program, kegiatan dan sub kegiatan yang diakomodir dalam renja, hampir semuanya terlaksana dengan baik, meskipun ada satu sub kegiatan yang capaiannya tidak mencapai 100%. Adapun sub kegiatan yang tidak tercapai 100% adalah sub kegiatan pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani, kegiatan pengembangan penerapan penyuluhan pertanian, program penyuluhan pertanian. Sub kegiatan ini tidak terlaksana dengan baik karena pada anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit yang masuk dalam sub kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan seluruhnya dikarenakan beberapa jenis kegiatan DBH Sawit mempunyai anggaran yang sama dengan kabupaten/kota yang membidangi perkebunan, sehingga dikhawatirkan akan tumpang tindih pelaksanaan kegiatan, sehingga tidak dapat dilaksanakan.

Untuk lebih jelasnya capaian pelaksanaan renja 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Renja Tahun Anggaran 2024

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	13.116.925.563	12.160.556.072	92,71
A.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	87.100.000	85.751.421	98,45
B.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.656.146.634	9.949.866.759	93,37
D.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	305.000.000	253.204.187	83,02
C.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.000.000	49.960.000	99,92
E.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.540.000.000	1.355.006.404	87,99
F.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	478.678.929	466.767.301	97,51
II	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	59.325.355	58.825.365	99,16
A.	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	59.325.355	58.825.365	99,16
III	Program Penyuluhan Pertanian	20.674.065.000	7.495.409.550	36,26
A.	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	20.674.065.000	7.495.409.550	36,26
	Total (I+II+III)	33.850.315.918	19.714.790.977	58,24

B. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Berjalan (2025)**Tabel 3.2. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun Anggaran 2025**

NO.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d Bulan Ini			Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Outcome / Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Targe t (%)	Realisasi		Narasi	Realiasi Fisik s.d Bulan Ini					
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realiasi Fisik		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	15.563.852.324	100	90,22	14.041.931.721	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	100	-	100	100	Disbun
A.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	130.500.000	100	89,19	116.386.837	Tersedianya Dokumen Perencanaan	5 Dokumen	100	-	100	100	Disbun
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	115.000.000	100	91,11	104.778.747	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	100	3 Dok	100	88,12	Disbun
2.	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.500.000	100	74,89	11.608.090	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	100	1 Laporan	100	11,88	Disbun
B.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.871.829.000	100	90,92	10.794.143.072	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	100	1 Tahun	100	100	

NO.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d Bulan Ini			Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Outcome / Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Targe t (%)	Realisasi		Narasi	Realiasi Fisik s.d Bulan Ini					
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realiasi Fisik		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.544.829.000	100	91,64	10.580.013.072	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	792 Orang/Bula n	100	792 orang/bula n	100	97,25	Disbun
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	327.000.000	100	65,48	214.130.000	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	5 Dokumen	100	5 Dok	100	49,00	Disbun
C.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	164.275.550	100	100	164.275.550	Tersedianya Perlengkapan Kebutuhan Kantor	1 Tahun	100	1 Tahun	100	100	
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	134.989.550	100	100	134.989.550	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	100	1 Paket	100	82,17	Disbun
2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	29.286.000	100	100	29.286.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	100	2 Orang	100	17,83	Disbun
D.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	612.500.000	100	84,91	520.049.127	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebutuhan kantor	1 Paket	100	1 Paket	99,84	99,84	
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	32.500.000	100	88,55	28.777.480	Jumlah paket komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor yang di	1 Paket	100	1 Paket	97,00	5,15	Disbun

NO.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d Bulan Ini			Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Outcome / Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Targe t (%)	Realisasi		Narasi	Realiasi Fisik s.d Bulan Ini					
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realiasi Fisik		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Bangunan Kantor					sediakan						
2.	Penyediaan Bahan Logistik kantor	245.000.000	100	85,80	210.203.388	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	100	1 Paket	100	40,00	Disbun
3.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000	100	66,51	16.627.000	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	100	1 Paket	100	4,08	Disbun
4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	100	22,92	4.584.000	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 Dokumen	100	2 Dok	100	3,27	Disbun
5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	290.000.000	100	89,61	259.857.259	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	150 Laporan	100	Laporan	100	47,35	Disbun
E.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	341.687.890	100	100	341.687.890	Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan yang Tersedia	1 Paket	100	1 Paket	100	100	
1.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas	241.900.000	100	100	241.900.000	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1 Unit	100	1 Unit	100	70,80	Disbun

NO.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d Bulan Ini			Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Outcome / Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Targe t (%)	Realisasi		Narasi	Realiasi Fisik s.d Bulan Ini					
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realiasi Fisik		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jabatan					Disediakan						
2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		-			-	
3.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99.787.890	100	100	99.787.890	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	52 Unit	100	52 Unit	100	29,20	
F.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.408.059.884	100	78,33	1.102.988.554	Tersedianya Kebutuhan Penunjang ADM Perkantoran	1 Tahun	100	1 Tahun	100	100	
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000	100	42,50	8.500.000	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	100	1 Laporan	100	1,42	Disbun
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	600.000.000	100	80,72	484.309.554	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang tersedia	12 Laporan	100	6 Laporan	100	42,61	Disbun
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	788.059.884	100	77,43	610.179.000	Jumlah laporan penyedia jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	24 Laporan	100	12 Laporan	100	55,97	Disbun

NO.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d Bulan Ini			Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Outcome / Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realiasi Fisik s.d Bulan Ini					
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realiasi Fisik		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
G.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.035.000.000	100	96,85	1.002.400.691	Terpeliharanya barang milik daerah	1 Tahun	100	1 Tahun	100	100	
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	800.000.000	100	95,96	767.680.125	Jumlah kendaraan dinas opsional atau lapangan yang di pelihara dan dibayarkan pajak dan perizinanya	90 Unit	100	Unit	100	77,29	Disbun
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.000.000	100	99,77	44.896.600	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	100	Unit	100	4,35	
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	190.000.000	100	99,91	189.823.966	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	100	Unit	100	18,36	
II	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.141.299.560	100	97,17	3.052.487.351	Persentase Peningkat Luas Tanaman Menghasilkan	1 Tahun	100	1 Tahun	100	98,10	
A.	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1.118.878.960	100	94,57	1.058.146.233	Terlaksananya pengawasan sarana pertanian	17 Kab/Kota	100	-	100	100	

NO.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d Bulan Ini			Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Outcome / Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Targe t (%)	Realisasi		Narasi	Realiasi Fisik s.d Bulan Ini					
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realiasi Fisik		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	1.118.878.960	100	94,57	1.058.146.233	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung pertanian	4 Laporan	100	2 Laporan	100	100	17 Kab/Kota
B.	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanam	1.891.375.000	100	99,16	1.875.561.876	Terlaksanannya Penerbitan Sertifikat	1 Tahun	100	1 Tahun	100	100	
1.	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	130.000.000	100	99,08	128.802.975	Jumlah Sertifikat Benih	4.100 Sertifikat	100	Sertifikat	100	6,87	17 Kab/Kota
2.	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	125.000.000	100	96,83	121.033.971	Jumlah Benih Unggul Bersertifikat Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 Tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 Laporan	100	1 Laporan	100	6,61	17 Kab/Kota
3.	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	1.636.375.000	100	99,35	1.625.724.930	Jumlah Benih bersertifikat perkebunan berbentuk batang	125000 batang	100	Batang	100	86,52	

NO.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d Bulan Ini			Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Outcome / Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Targe t (%)	Realisasi		Narasi	Realiasi Fisik s.d Bulan Ini					
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realiasi Fisik		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
C.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme	131.045.600	100	90,64	118.779.242	Meningkatnya Menejemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	1 Tahun	100	1 Tahun	100	100	
1.	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	131.045.600	100	90,64	118.779.242	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan Mikroorganisme	1 Laporan	100	1 Laporan	100	100	Disbun
III.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	228.125.000	100	96,44	220.011.429	Meningkatnya Kelompok Petani yang Mendapatkan Penyuluhan	1 Tahun	100	1 Tahun	96,86	96,86	
A.	Penataan Prasarana Pertanian	228.125.000	100	96,44	220.011.429	Meningkatnya Penataan Prasarana Pendukung	17 Kab/Kota	100		96,86	96,86	
1.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	28.125.000	100	73,40	20.644.450	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	4 Laporan	100	2 Laporan	74,50	9,18	17 Kab/Kota
2.	Pembangunan, Rehabilitas dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian Serta Sarana Pendukungnya	200.000.000	100	99,68	199.366.979	Jumlah Gedung UPTD Pertanian Serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit	100	unit	100	87,67	

NO.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d Bulan Ini			Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Outcome / Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Targe t (%)	Realisasi		Narasi	Realiasi Fisik s.d Bulan Ini					
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realiasi Fisik		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IV.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	534.985.000	100	92,94	497.191.349	Persentase Peningkat Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	1 Tahun	100	1 Tahun	93,64	93,64	
A.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	534.985.000	100	92,94	497.191.349	Meningkatnya Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	17 Kab/Kota	100	-	93,64	93,64	
1.	Pengendalian Oranisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	404.645.000	100	97,14	393.072.851	Jumlah Luas Serangan OPT Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Dikendalikan	550 Ha	100	Ha	98,00	74,12	Disbun
2.	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	130.340.000	100	79,88	104.118.498	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	200 Ha	100	Ha	80,10	19,52	17 Kab/Kota
V	Program Perizinan Usaha Pertanian	37.900.000	100	96,96	36.747.350	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	1 Tahun	100	1 Tahun	100	100	

NO.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d Bulan Ini			Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Outcome / Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Targe t (%)	Realisasi		Narasi	Realiasi Fisik s.d Bulan Ini					
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realiasi Fisik		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A.	Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	37.900.000	100	96,96	36.747.350	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Izin Usaha Pertanian	17 Kab/Kota	100	-	100	100	
1.	Pembinaan dan Pengawasan penerapan standar dan izin Usaha Pertanian	37.900.000	100	96,96	36.747.350	Jumlah Izin Usaha Pertanian Yang Dibina dan diawasi	18 Laporan	100	Laporan	100	100	17 Kab/Kota
VI	Program Penyuluhan Pertanian	10.431.538.100	100	95,83	9.996.411.576	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	1 Tahun	100	1 Tahun	100	100	
A.	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	10.381.138.100	100	95,82	9.947.382.702	Meningkatnya Persentase Pelaksanaan	17 Kab/Kota	100	-	100	100	
1.	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	10.381.138.100	100	95,82	9.947.382.702	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	93 Kelompok	100	Kelompok	100	100	
B.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis kawasan	50.400.000	100	97,28	49.028.874	Meningkatnya Pembentukan kelembagaan Korporasi Petani	17 Kab/Kota	100	-	100	100	17 Kab/Kota

NO.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan s.d Bulan Ini			Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Outcome / Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target (%)	Realisasi		Narasi	Realiasi Fisik s.d Bulan Ini					
				%	(Rp)		Target Kinerja	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realiasi Fisik		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Pembentukan dan Penguatan kelembagaan Korporasi Petani	50.400.000	100	97,28	49.028.874	Jumlah Korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	1 Unit	100	Unit	100	100	
	Jumlah Program: 6 Jumlah Kegiatan: 15 Jumlah Sub Kegiatan: 32	29.937.699.984	100	93,01	27.844.780.776	-	-	100	-	99,54		

C. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/ kegiatan/ sub kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan digunakan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Dalam kerangka pengukuran kinerja terdapat tahapan penetapan, pengumpulan data kinerja dan cara pengukuran kinerja.

Tabel 3.3. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Tahun 2024

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
I.k	Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan/Meningkatnya Areal Produksi Perkebunan	Perentase peningkatan luas tanaman menghasilkan (%)	0,39	0,16	41	Data yang digunakan adalah data angka sementara statistik perkebunan tahun 2024	Angka tetap statistik perkebunan akan ditetapkan oleh pusat
		Jumlah luas areal Perkebunan (Ha)	2.960.000	2.861.226	97	Data yang digunakan adalah data angka sementara statistik perkebunan tahun 2024	Angka tetap statistik perkebunan akan ditetapkan oleh pusat
	Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan/Meningkatnya Produktivitas Tanaman Perkebunan	Produktivitas Karet (Ton/Ha/Thn)	1,47	1,17	79,59	Data yang digunakan adalah data angka sementara statistik perkebunan tahun 2024	Angka tetap statistik perkebunan akan ditetapkan oleh pusat
		Produktivitas Kelapa Sawit (Ton/Ha/Thn)	3,54	3,43	96,89		
		Produktivitas Kopi (Ton/Ha/Thn)	0,94	0,89	94,68		
		Produktivitas Kelapa (Ton/Ha/Thn)	1,18	1,15	97,46		
		Jumlah Benih Unggul yg beredar (Benih)	17.000.000	19.076.378	112,20	1. Meningkatnya permintaan masyarakat akan benih/bibit unggul ditunjang dengan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) 2. Bantuan Pemerintah berupa benih unggul kepada masyarakat.	Akan terus ditingkatkan
		Persentase peningkatan prasarana perkebunan (%)	13,70	20	145,98	1. Kebijakan Pemerintah terkait regulasi yang mendorong pengembangan perkebunan. 2. Permintaan pasar akan komoditas terutama Sawit, Kopi dan Karet. 3. Dukungan peningkatan kapasitas petani melalui penyuluh perkebunan.	Akan terus ditingkatkan
		Meningkatnya pengawasan perusahaan perkebunan (unit)	316	316	100	1. Sudah menjadi kewenangan Dinas Perkebunan provinsi, kabupaten/kota untuk melakukan pembinaan terhadap perusahaan perkebunan. 2. Adanya koordinasi dengan dinas yang membidangi kabupaten/kota.	Akan terus ditingkatkan

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
		Persentase petani yang tergabung dalam pengolahan pemasaran bersama (%)	24,10	26,60	110,37	1. Tumbuhnya kesadaran petani untuk menjual hasil kebun karetinya melalui UPPB. 2. Stabilitas harga di UPPB mendorong petani untuk bergabung. 3. Dukungan regulasi pemerintah.	Akan terus ditingkatkan
		Meningkatnya Kelompok Petani yang Mendapatkan Penyuluhan (kelompok)	92	122	132,6	1. Adanya Tenaga Pendamping Peningkatan Produksi Perkebunan (TP4) yang tersebar di 17 kabupaten/kota sangat membantu dalam pembinaan kelompok-kelompok tani. 2. Dukungan dari kegiatan program peremajaan Sawit Rakyat dan pendataan petani untuk mendapatkan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB). 3. Adanya kegiatan bantuan kepada masyarakat melalui dana TP.	Akan terus ditingkatkan
		Nilai Tukar Petani Perkebunan	115,10	130,35	113,25	Naiknya harga beberapa komoditi perkebunan seperti Kopi, Sawit dan Kakao	Akan terus ditingkatkan
	Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan/ Meningkatnya Perlindungan Perkebunan	Luas areal yang tertanggulangi dari serangan OPT dan gangguan usaha (Ha)	650	32.767	> 100	Dukungan anggaran Tugas Pembantuan untuk pengendalian OPT, anggaran Dekonsentrasi untuk operasional Petugas pengamat OPT	Akan terus ditingkatkan
	Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan/Dukungan Kesekretariatan untuk Meningkatkan Produksi Perkebunan	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	100	1. Pengelolaan administrasi yang efisien. 2. Koordinasi yang baik berbagai pihak dalam organisasi. 3. Penyediaan data dan informasi yang akurat. 4. Perencanaan yang tepat. 5. Dukungan SDM dan, 6. Komitmen dan dukungan pimpinan.	Akan terus ditingkatkan

Tabel 3.4. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Tahun 2025

N o.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
1.	<u>Tujuan:</u> Meningkatnya Kesejahteraan Petani Sub Sektor Perkebunan	Nilai Tukar Petani (NTP) Perkebunan	116	138	Meningkatnya permintaan pasar akan komoditas perkebunan menyebabkan peningkatan harga yang berpengaruh langsung kepada NTP Perkebunan	Akan terus ditingkatkan
	<u>Sasaran:</u> Meningkatnya Produksi Tanaman Unggulan Perkebunan	Persentase Peningkatan Produksi Karet (%)	0,109 %	-2,28%	- Data yang digunakan adalah angka sementara statistik perkebunan - Semakin berkurangnya minat petani untuk mengembangkan tanaman karet menyebabkan produksi menurun secara global - Kelapa Sawit menjadi tanaman primadona karena tingginya permintaan ekspor global	Akan terus ditingkatkan
			1.009.461,18 Ton	985.325,32		
		Persentase Peningkatan Produksi Kelapa Sawit (%)	0,445 %	0,59%		
			3.415.125,6 Ton	3.419.952,76		
		Persentase Peningkatan Produksi Kopi (%)	3,713%	3,93%		
			226.786.630 Ton	227.266,87		
		Persentase Peningkatan Produksi Kelapa (%)	1,441%	0,16%		
			62.121,88 Ton	61.744,75		
	<u>Sasaran:</u> Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Evaluasi Aktif dari SAKIP	80,00	78,89	- Kelemahan dalam penyusunan dokumen perencanaan - Rendahnya capaian kinerja - Kurangnya evaluasi internal dan ketepatan penyusunan laporan	Akan terus ditingkatkan

D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD merupakan bagian integral dari proses penyusunan rencana kerja perangkat daerah, yang membandingkan rancangan awal dengan analisis kebutuhan untuk memastikan keselarasan.

Pada rancangan awal difokuskan pada pengembangan tanaman kelapa pandan wangi yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani melalui komoditas bernilai tinggi dengan harga jual lebih mahal dibandingkan kelapa biasa, penanganan pasca panen, pengendalian Organisme pengganggu Tanaman (OPT), sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dan gangguan usaha perkebunan, fasilitasi Tenaga Pendamping Peningkatan Produksi Perkebunan dan pengelolaan dan pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit, serta peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Pada rencana kerja pembangunan perkebunan terjadi pengurangan anggaran karena adanya efisiensi dan penambahan belanja pegawai untuk PPPK dan penambahan belanja barang dan jasa untuk pembiayaan gaji PPPK Paruh Waktu, sehingga beberapa kegiatan yang menjadi fokus pada rancangan awal dikurangi karena anggaran berkurang.

Pada rancangan awal RKPD, pagu anggaran direncanakan sebesar Rp. 30.504.539.564,- (Tiga puluh milyar lima ratus empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah). Setelah efisiensi, pagu anggaran berkurang menjadi Rp. 23.613.502.911,- (Dua puluh tiga milyar enam ratus tiga belas juta lima ratus dua ribu sembilan ratus sebelas rupiah).

Dukungan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan terhadap program strategis pemerintah daerah yaitu Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) yang meliputi peningkatan produksi tanaman perkebunan dan melanjutkan program satu desa satu penyuluh yaitu melalui peningkatan pengawasan benih perkebunan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan, pembinaan dan pengawasan kebun sumber benih Kopi di Kota Pagaralam dan Kabupaten OKU Selatan, pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), pencegahan dan penanganan gangguan usaha perkebunan serta fasilitasi pembayaran honorarium Petugas Tenaga Pendamping Peningkatan Produksi Perkebunan (TP4).

E. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan kegiatan dari masyarakat petani untuk meningkatkan kesejahteraan melalui usaha sub sektor perkebunan semakin banyak, diantaranya kebutuhan akan alsintan, pelatihan budidaya berkelanjutan, kebutuhan akan sarana dan prasarana pendukung untuk peningkatan produksi dan mutu hasil perkebunan.

Banyaknya usulan yang masuk, mengharuskan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mengakomodir kebutuhan tersebut ke dalam Rencana Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.

IV. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional

Kebijakan Nasional Pembangunan Nasional Indonesia tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. RPJMN selaras dengan Asta Cita sebagai misi presiden yang menekankan prioritas jangka menengah yang terukur melalui program, kegiatan, dan proyek prioritas.

RPJMN menargetkan tiga sasaran pembangunan nasional utama yaitu penurunan kemiskinan, peningkatan Indeks Modal Manusia (IMM), dan pertumbuhan ekonomi.

Perpres Nomor 12 Tahun 2025 menetapkan RPJMN 2025-2029 sebagai pedoman prioritas nasional, termasuk perkebunan dalam PN2 (kemandirian pangan/energi) dan PN5 (hilirisasi SDA). RPJMN 2025-2029 menjadikan subsektor perkebunan sebagai pilar strategis pembangunan nasional, terintegrasi dalam prioritas swasembada pangan, energi, hilirisasi SDA, dan ketahanan iklim untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Kebijakan ini difokuskan pada peningkatan produktivitas komoditas unggulan seperti sawit, karet, kelapa, kakao, kopi, dan hilirisasi untuk nilai tambah domestik serta ekspor.

Komoditas perkebunan unggulan di Sumatera Selatan yaitu Kelapa Sawit, Karet, Kopi dan Kelapa. Strategi umum untuk pengembangan komoditas unggulan dengan cara meningkatkan produktivitas dengan peremajaan kebun-kebun tua, penggunaan bibit berkualitas tinggi, pengembangan konektivitas antar komponen produksi dari hulu sampai hilir dan mendorong berkembangnya industri hilir secara terpadu.

B. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Sesuai dengan target dan sasaran yang dirumuskan dalam Renstra SKPD, maka diharapkan Rencana Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 ini dapat mewujudkan pencapaian kinerja pembangunan perkebunan yang meliputi:

- 1) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan petani pekebun. Pengelolaan usaha perkebunan akan semakin baik jika kualitas

sumberdaya manusia yang ada baik aparat maupun non aparat ditingkatkan melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan. pembinaan kelembagaan diarahkan agar terjalin kemitraan yang baik antara kelembagaan petani dengan investor ataupun pengusaha perkebunan.

- 2) Meningkatnya mutu dan nilai tambah produk perkebunan, meningkatnya mutu dan nilai tambah produk hasil perkebunan diharapkan akan meningkatkan pendapatan petani pekebun. hal ini dapat tercapai apabila pengembangan agribisnis di berbagai sub sektornya dipadu dan diperkuat seperti di sub sistem perdagangan hasil/produk perkebunan, sub sistem pengolahan hasil perkebunan atau agroindustri serta subsistem perdagangan hasil kegiatan agroindustri.
- 3) Meningkatnya produksi, produktivitas dan pendapatan petani pekebun.

C. Program dan Kegiatan

Secara garis besarnya dalam penyusunan rencana kerja tahun 2026 terdapat 6 program dengan 14 kegiatan dan 23 sub kegiatan.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan
Prakiraan Maju Tahun 2027 Provinsi Sumatera Selatan

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Kerja Tahun 2027 (Renstra 2025-2029)		
			Target Kinerja	Target Lokasi	Pagu Anggaran	Target Kinerja	Target Lokasi	Pagu Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dinas Perkebunan							
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%		18.532.557.372	100%		25.671.511.798
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan dan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-		-	8 Lap/Dok		440.000.000
3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	5 Dokumen	Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan	250.000.000

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Kerja Tahun 2027 (Renstra 2025-2029)		
			Target Kinerja	Target Lokasi	Pagu Anggaran	Target Kinerja	Target Lokasi	Pagu Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	2 Laporan	Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan	40.000.000
3.27.01.1.01.0008	Pelaksanaan pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya pengumpulan data statistik sektoral daerah	-	-	-	1 Dokumen	Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan	100.000.000
3.27.01.1.01.0010	Penyelenggaraan walidata pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya walidata pendukung statistik sektoral daerah	-	-	-	1 Dokumen	Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan	50.000.000
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	periode pelaksanaan administrasi perangkat daerah	1 Tahun		14.780.274.564	1 Tahun		18.766.511.798
3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.680 Orang/Bulan	Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan	14.570.274.564	792 orang/Bulan	Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan	18.416.511.798
3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan	210.000.000	6 Dokumen	Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan	350.000.000

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Kerja Tahun 2027 (Renstra 2025-2029)		
			Target Kinerja	Target Lokasi	Pagu Anggaran	Target Kinerja	Target Lokasi	Pagu Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Periode pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Tahun		20.000.000	1 Tahun		50.000.000
3.27.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan	20.000.000	1 Laporan	Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan	50.000.000
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	periode pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 Tahun		11.000.000	1 Tahun		600.000.000
3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	-	-	1 Paket	Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan	250.000.000
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan	11.000.000	20 Orang	Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan	350.000.000
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	periode pelaksanaan administrasi perangkat daerah	1 Tahun		378.000.000	1 Tahun		1.460.000.000

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Kerja Tahun 2027 (Renstra 2025-2029)		
			Target Kinerja	Target Lokasi	Pagu Anggaran	Target Kinerja	Target Lokasi	Pagu Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan	30.000.000	1 Paket	Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan	60.000.000
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan	98.000.000	3 Paket	Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan	500.000.000
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	-	1 Paket	Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan	50.000.000
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	-	1 Dokumen	Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan	50.000.000
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan	250.000.000	150 Laporan	Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan	800.000.000
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-	-	-			1.150.000.000

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Kerja Tahun 2027 (Renstra 2025-2029)		
			Target Kinerja	Target Lokasi	Pagu Anggaran	Target Kinerja	Target Lokasi	Pagu Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.27.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	-	-	-	2 Unit Rd 4	Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan	700.000.000
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	-	25 unit	Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan	250.000.000
3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	50 unit	Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan	200.000.000
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Periode pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1 Tahun		3.025.282.808			1.505.000.000
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan	12.000.000	1 Laporan	Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan	25.000.000
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan	522.422.808	12 Laporan	Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan	700.000.000

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Kerja Tahun 2027 (Renstra 2025-2029)		
			Target Kinerja	Target Lokasi	Pagu Anggaran	Target Kinerja	Target Lokasi	Pagu Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan	2.490.860.000	12 Laporan	Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan	780.000.000
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Periode pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1 Tahun		318.000.000	1 Tahun		1.700.000.000
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit	Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan	300.000.000	90 unit	Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan	850.000.000
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan	18.000.000	50 unit	Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan	100.000.000
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	3 unit	Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan	750.000.000

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Kerja Tahun 2027 (Renstra 2025-2029)		
			Target Kinerja	Target Lokasi	Pagu Anggaran	Target Kinerja	Target Lokasi	Pagu Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Luas Pengembangan Komoditi Perkebunan (ha)	150 Ha		715.000.000			5.270.000.000
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Dokumen Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1 Laporan		575.000.000			2.000.000.000
3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	-	-	-	1 Laporan	Kabupaten/kota	350.000.000
3.27.02.1.01.0005	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil perkebunan	1 Laporan	Kabupaten/kota	575.000.000		Kabupaten/kota	1.650.000.000
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Dokumen Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3 Dokumen		115.000.000			2.920.000.000
3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah sertifikat benih	4200 Sertifikat	Kabupaten/kota	75.000.000	4.200 sertif	Kabupaten/kota	300.000.000

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Kerja Tahun 2027 (Renstra 2025-2029)		
			Target Kinerja	Target Lokasi	Pagu Anggaran	Target Kinerja	Target Lokasi	Pagu Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.27.02.1.02.0012	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	1 Laporan	Kabupaten/kota	25.000.000	82.000 bgt	Kabupaten/kota	2.470.000.000
3.27.02.1.02.0020	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 Laporan	Kabupaten/kota	15.000.000	1 Laporan	Kabupaten/kota	150.000.000
3.27.02.1.03	<i>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi</i>	<i>Periode pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikroorganisme kewenangan provinsi</i>	1 Tahun		25.000.000			350.000.000
3.27.02.1.03.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	1 Laporan	Kab.Banyuasin (Pemeliharaan kebun sumber benih Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan)	25.000.000	1 Laporan	Kabupaten/kota	350.000.000

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Kerja Tahun 2027 (Renstra 2025-2029)		
			Target Kinerja	Target Lokasi	Pagu Anggaran	Target Kinerja	Target Lokasi	Pagu Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase realisasi pembangunan prasarana perkebunan	100%		25.000.000			450.000.000
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah dokumen dan laporan penataan prasarana perkebunan	2 dokumen		25.000.000			450.000.000
3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan	25.000.000	1 Laporan	Kabupaten/kota	150.000.000
3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah gedung UPTD pertanian serta sarana pendukungnya yang dibangun, dipelihara dan direhabilitasi	-	-	-	2 Unit	Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan	300.000.000
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Luas Areal yang tertanggulangi dari serangan OPT dan Gangguan Usaha (Ha)	375 Ha		554.945.539			1.450.000.000

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Kerja Tahun 2027 (Renstra 2025-2029)		
			Target Kinerja	Target Lokasi	Pagu Anggaran	Target Kinerja	Target Lokasi	Pagu Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah pengendalian dan penanggulangan bencana perkebunan (kegiatan)	2 Kegiatan		554.945.539			1.450.000.000
3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	125 Ha	Kabupaten/kota	454.945.539	250 Ha	Kabupaten/kota	1.000.000.000
3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah area terdampak perubahan iklim tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang ditangani.	-	-	-	50 ha	Kabupaten/kota	100.000.000
3.27.05.1.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	250 Ha	Daerah rawan kebakaran lahan perkebunan; Kab. Muba, Muara Enim, OKI, PALI, OI, Banyuasin.	100.000.000	250 Ha	Daerah rawan kebakaran lahan perkebunan; Kab. Muba, Muara Enim, OKI, PALI, OI, Banyuasin.	350.000.000
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Izin Usaha yang diawasi dan dibina	20%		35.000.000			150.000.000

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Kerja Tahun 2027 (Renstra 2025-2029)		
			Target Kinerja	Target Lokasi	Pagu Anggaran	Target Kinerja	Target Lokasi	Pagu Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.27.06.1.01	<i>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Rekomtek usaha perkebunan</i>	<i>1 Dokumen</i>		35.000.000			150.000.000
3.27.06.1.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	16 Laporan	Kabupaten/kota	35.000.000		Kabupaten/kota	150.000.000
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	100%		3.751.000.000			6.440.000.000
3.27.07.1.02	<i>Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian</i>	<i>honorarium Tenaga Pendamping Peningkatan Produksi Perkebunan</i>	<i>155 Orang</i>		3.731.000.000			6.340.000.000
3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	94 Kelompok	Kabupaten/kota	3.731.000.000		Kabupaten/kota	6.340.000.000

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Kerja Tahun 2027 (Renstra 2025-2029)		
			Target Kinerja	Target Lokasi	Pagu Anggaran	Target Kinerja	Target Lokasi	Pagu Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelembagaan pekebun yang terbentuk (kelompok)	1 Kelompok		20.000.000			100.000.000
3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	1 Unit	Sosialisasi pengembangan kapasitas kelembagaan di wilayah sentra Kelapa sawit	20.000.000		Kabupaten/kota	100.000.000
TOTAL					23.613.502.911			39.431.511.798

V. PENUTUP

Pembangunan sub-sektor perkebunan merupakan bagian dari sektor pertanian yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Sub-sektor ini meliputi kegiatan budidaya tanaman perkebunan yang dimanfaatkan untuk berbagai produk, seperti minyak kelapa sawit, karet, kopi, teh, kakao, tembakau, dan rempah-rempah. Pembangunan sub-sektor perkebunan memiliki berbagai dimensi yang melibatkan peningkatan produktivitas, kesejahteraan petani, dan keberlanjutan lingkungan.

Pembangunan sub sektor perkebunan berkembang kian pesat dengan berbagai kendala yang makin kompleks, bukan saja dari segi pembiayaan, perencanaan, pelaksanaan dan pembagian wilayah komoditas dalam suatu kawasan, melainkan kultur dan struktur usaha dan jumlah Sumber Daya Manusia perkebunan relatif belum mendukung pembangunan perkebunan secara komprehensif. Oleh sebab itu diperlukan upaya perbaikan dan restrukturisasi atau Revitalisasi dibidang usaha perkebunan yang meliputi pengembangan kompetensi SDM perkebunan baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian dan pengawasan, pengembangan model dan pendekatan pola usaha yang lebih representative dan kebijakan yang adaptif terhadap mekanisme pasar sehingga paradigma pembangunan perkebunan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, berdimensi pasar dan berdaya saing global dapat memberikan kesejahteraan seluas luasnya bagi petani pekebun.

Demikian, Rencana Kerja Kegiatan Pembangunan Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 yang dapat kami sajikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.